

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori *Political Will*

Political will ditempatkan sebagai konsep sentral untuk memahami pemaknaan Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki komitmen politik yang nyata dalam mengawal kebijakan program MBG. Pada level pemerintah kota, *political will* terlihat ketika kebijakan tidak berhenti pada keputusan formal, tetapi diterjemahkan menjadi arah tindakan yang jelas, dukungan kelembagaan, dan keberanian pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program ketika berhadapan dengan tantangan implementasi (Satriawan & Syamsuri, 2023).

Komitmen politik pemerintah daerah tampak dari kemampuan menjadikan program sebagai agenda strategis daerah (Mastaldiah, 2020). Artinya, pemerintah tidak sekadar menjalankan mandat kebijakan dari level yang lebih tinggi, tetapi menunjukkan keberpihakan yang jelas melalui prioritas kebijakan, penyelarasan perangkat daerah, dan perhatian pimpinan terhadap jalannya program (Hasniati et al., 2023). *Political will* berperan penting dalam menentukan suatu kebijakan mampu bergerak dari tahap keputusan menuju implementasi yang efektif, terutama pada kebijakan yang

membutuhkan dukungan lintas sektor dan kapasitas birokrasi yang kuat. *Political will* menurut (Raile et al., 2010) dalam penelitian ini dianalisis melalui empat indikator penting, yaitu:

2.1.1.1 Ketercukupan Aktor Pengambil Keputusan

Keterlibatan aktor-aktor berkaitan dengan yang memiliki kewenangan dalam mendukung implementasi kebijakan. *Political will* membutuhkan adanya aktor pengambil keputusan yang memiliki kapasitas untuk menyetujui, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan agar tujuan program dapat tercapai. Indikator tersebut secara khusus digunakan untuk mengkaji keterlibatan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam implementasi program MBG, terutama melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, pihak kelurahan, sekolah penerima manfaat, dan pengelola SPPG. Keterlibatan tersebut mencerminkan adanya inisiatif elit politik (*elite initiative*) yang ditunjukkan melalui kesediaan aktor pemerintah untuk mendorong implementasi kebijakan dan menempatkannya sebagai agenda prioritas.

2.1.1.2 Kesamaan Pemahaman terhadap Masalah Kebijakan

Adanya kesamaan pemahaman antaraktor mengenai masalah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan. *Political will* muncul ketika para pengambil keputusan memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya suatu masalah dan menempatkannya sebagai agenda kebijakan pemerintah. Indikator tersebut secara khusus digunakan

untuk mengkaji pemahaman Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap persoalan pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG sebagai bagian dari agenda kebijakan daerah. Kesamaan pemahaman tersebut penting untuk mendukung mobilisasi birokrasi (*bureaucratic mobilization*), karena implementasi kebijakan memerlukan koordinasi dan keselarasan tindakan antarorganisasi pemerintah yang terlibat.

2.1.1.3 Komitmen Politik dalam Mendukung Kebijakan

Indikator ini berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung kebijakan secara nyata dan berkelanjutan. Komitmen dalam hal ini mencakup komitmen sumber daya (*resource commitment*) dan keberlanjutan komitmen (*continuity or sustainability commitment*), yaitu kesediaan pemerintah untuk menyediakan dukungan administratif, kelembagaan, dan menjaga kesinambungan implementasi kebijakan. Indikator tersebut secara khusus digunakan untuk mengkaji komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendukung implementasi program MBG, termasuk dukungan koordinasi lintas instansi, pengawasan implementasi distribusi makanan bergizi, dukungan administratif terhadap operasional SPPG, dan dukungan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan implementasi program MBG di Kota Tasikmalaya.

2.1.1.4 Dukungan terhadap Solusi Kebijakan yang Efektif

Kebijakan yang dijalankan harus dipandang sebagai solusi yang mampu menyelesaikan masalah secara efektif. *Political will* tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan, tetapi juga mencakup kesiapan pemerintah dalam memastikan solusi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif melalui kesiapan sumber daya, mekanisme implementasi, dan dukungan kelembagaan. Indikator tersebut secara khusus digunakan untuk mengkaji dukungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap program MBG sebagai solusi kebijakan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Efektivitas implementasi kebijakan memerlukan adanya mobilisasi birokrasi (*bureaucratic mobilization*), yaitu kemampuan pemerintah menggerakkan perangkat organisasi, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme operasional agar kebijakan dapat diterapkan secara nyata.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka ini didasarkan pada Teori *Political Will* Raile yang relevan karena, memiliki indikator yang lebih operasional sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan di lapangan. Teori ini mampu memberikan dasar analisis yang jelas dalam melihat keseriusan, dukungan, dan arah tindakan pemerintah daerah terhadap implementasi suatu kebijakan publik. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam

memahami konsistensi, arah, dan keberlanjutan *political will* Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam implementasi kebijakan MBG di tingkat lokal sebagaimana digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Penjelasan:

Penelitian ini berangkat dari persoalan pokok dari permasalahan empiris di lapangan, yaitu masih adanya kendala kesiapan distribusi dan koordinasi pelaksana, ketidaksiapan dalam memenuhi syarat pelaksanaan, dan ditemukannya dugaan pungutan liar. Permasalahan tersebut diperoleh dari temuan wawancara lapangan dan menjadi dasar penting untuk melihat adanya persoalan dalam implementasi program. Permasalahan tersebut menjadi titik masuk untuk menelaah sejauh mana pemerintah daerah menunjukkan komitmen.

Permasalahan tersebut dianalisis melalui teori *Political Will* Post, Raile dan Raile merupakan dukungan yang berkomitmen dari aktor pengambil keputusan, terhadap suatu solusi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh adanya dukungan politik yang terarah dan konsisten dari para pengambil keputusan.

Post, Raile, dan Raile menjelaskan bahwa *political will* merupakan konsep yang bersifat sistematis karena dibangun melalui beberapa komponen utama yang saling berkaitan. *Political will* tidak hanya dipahami sebagai pernyataan dukungan pemerintah, tetapi juga mencakup keterlibatan aktor pengambil keputusan, penempatan masalah dalam agenda formal pemerintah, komitmen terhadap kebijakan, dan dukungan terhadap solusi kebijakan yang dianggap mampu menyelesaikan masalah publik.